

**IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA (LKD)
DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara**



OLEH

**MUSPIDA
NPM. 220411054**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 21
Bulan : Mei
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SEKRETARIS



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

1. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) ()
2. RISVANDI, SPdi., M.Si (Anggota Penguji I) ()
3. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI DESA
RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA : MUSPIDA
NPM : 220411054
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

PEMBIMBING II



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : MUSPIDA
NPM : 220411054
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 14 April 2026



MUSPIDA
NPM. 220411054

MOTTO

"Allah tidak mengatakan hidup itu mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan".

(Q.S. Al-Insyirah,:5-6)

"hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang di takdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan ku".

(Umar Bin Khattab)

"selesaikan apa yang telah kamu mulai, lewati saja badainya jangan ubah tujuannya"

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengembal amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW, yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah*. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda sarkawi** dan **Iusnawati**, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis sehingga dapat mengecap pendidikan serta dapat menyaksikan keindahan dunia ini. Terima kasih juga telah membesarkan dan mendidik penulis dan juga sudah menjadi penyemangat terhebat dalam kehidupan penulis.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis



MUSPIDA
NPM. 220411054

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi penelitian yang berjudul **“Implementasi program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”** ini dapat disusun dengan baik. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran dan efektivitas lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Melalui penelitian ini, di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Rawang Binjai.

Dalam proses penyusunan karya ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. oleh karna itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. H. Ikrima Mailani, Spd.I., M.Pd.I sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah serta memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat kemudahan dan pencerahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah mendidik penulis, membimbing, memberikan kritikan, masukan dan saran serta motivasi kepada penulis sehingga selesainya penelitian ini.
5. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing II penulis yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan penulis, masukan dan saran serta motivasi kepada penulis sehingga selesainya penelitian ini.
6. Ibu Melliofatria, S.Pd, M.Pd selaku Penasehat Akademik (PA) yang banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan serta motivasi penulis dalam kesuksesan penulisan penelitian ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik, memberikan pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu penulis sehingga lancarnya proses administrasi dalam menyelesaikan pendidikan akademik penulis.
9. Orang tua tercinta Ayah Sarkawi dan Ibu Lusnawati, serta Abang Agi Dona Saputra dan Kakak Fitri, Icha Permata Sari atas doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materil, serta kesabaran mereka selama penulis menempuh studi. Tanpa restu dan pengorbanan mereka, penulis tidak akan mampu melewati tahap ini.
10. Teman-teman seperjuangan, sahabat, dan rekan mahasiswa terutama geng pejuang S.Sos yang telah memberikan dukungan semangat, bantuan, kerja sama, serta lingkungan yang kondusif selama penulis menjalani proses penyusunan proposal ini.
11. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu pemerintahan desa dan masyarakat Desa Rawang Binjai Kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi dihaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, serta data yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kepada penulis.
12. Dan terima kasih kepada diri sendiri, telah bertahan dalam suka dan duka selama pekulihan.

13. Terima kasih kepada ardi permandus wiranata biasa sih di panggil abang, sudah menemani penulis dalam melewati semua perjalanan selama perkuliahan, baik senang maupun sedih. Terima kasih juga untuk selama ini menemani 7 tahun penulis, dan terima kasih juga untuk *support finansial and I'm happy to have you*.

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan penelitian ini, namun penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi memperbaiki di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan, untuk menuju kearah kesempurnaan penelitian selanjutnya.

Teluk kuantan, 14 April 2026

Muspida

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PERNYATAAN ORISINALITAS	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
BAB I :PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian pustaka	10
2.1.1 Konsep Administrasi Negara	10
2.1.2 Konsep Manajemen	14
2.1.3 Konsep organisasi	18
2.1.4 Konsep kebijakan	21
2.1.5 Konsep Implementasi.....	26
2.1.6 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	28
2.1.7 Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	32
2.1.8 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	34
2.1.9 Pengertian Pemerintahan Desa dan Masyarakat.....	35
2.1.10 Konsep Pembangunan Masyarakat.....	38
2.2. Kerangka Pemikiran	40

2.3. Hipotesis Kerja	40
2.4. Defenisi Operasional	41
2.5. Operasional Variabel	45
BAB III : METODE PENELITIAN.....	46
3.1. Jenis Penelitian	46
3.2. Informan Penelitian	47
3.3. Sumber Data	47
3.3.1 Data Primer.....	47
3.3.2 Data Sekunder	48
3.4. Fokus Penelitian.....	48
3.5. Lokasi Penelitian	48
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	49
3.6.1 Wawancara	49
3.6.2 Observasi	49
3.3.1 Dokumentasi.....	49
3.7. Metode Analisa Data	49
3.7.1 Reduksi Data	50
3.7.2 Penyajian Data	50
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	50
3.7.4 Trigulasi	50
3.8. Jadwal Penelitian	51
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	52
4.1. Sejarah Singkat Desa Rawang Binjai.....	52
4.2. Keadaan Georafis	53
4.3. Keadaan Penduduk.....	54
4.4. Agama	56
4.5. Sarana Olaraga	56
4.6. Struktur Organisasi Desa Rawang Binjai.....	58
4.7. Visi dan Misi Desa Rawang Binjai	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
5.1. Identitas Responden.....	62

5.2. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	65
BAB VI PENUTUP	80
6.1. Kesimpulan	80
6.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penduduk Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean kabupaten kuantan singingi.....	5
Tabel 2.1 Jenis Program Pemberdayaan Masyarakat Didesa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	6
Tabel 2.5.1 Operasional Variabel Penelitian	45
Tabel 3.2.1 Tabel Informan	47
Tabel 4.1 Tabel Jumlah Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	53
Tabel 4.2 Data Jumlah Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	55
Tabel 4.3Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	55
Tabel 4.4 Sarana Penduduk Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	55
Tabel 4.5 Agama yang dianut di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	56
Tabel 4.6 Sarana Tempat Ibadah Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	56
Tabel 4.7 Sarana Olahraga di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	57
Tabel 5.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 5.2 Jumlah Responden	62
Tabel 5.3 Jumlah Responden Berdasarkan Berdasarkan Umur.....	63
Tabel 5.4 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
Tabel 5.5 Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan	65
Tabel 5.6 Jumlah Responden Berdasarkan Status Pernikahan	65
Tabel 5.7 Jumlah Responden Berdasarkan Alamat atau Tempat Tinggal	65

DAFTAR GAMBAR

2.2 Gambar/Bagan Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean kabupaten kuantan singingi	58

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	: Daftar Wawancara Kualitatif
Lampiran 2	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Lampiran 4	: Surat Balasan Riset Penelitian
Lampiran 5	: Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi Penelitian
Lampiran 6	: Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal Penelitian
Lampiran 7	: Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi Penelitian
Lampiran 8	: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA(LKD) DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

**MUSPIDA
NPM.220411054**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. LKD merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, berbagai fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program LKD belum berjalan optimal, seperti kurangnya perhatian pemerintah desa, minimnya dukungan anggaran, lemahnya koordinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Posyandu, Ketua pkk, Ketua kelompok tani serta masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah terimplementasi dan berjalan.

Kata Kunci: Implementasi, LKD, Pemberdayaan Masyarakat, Kebijakan Publik.

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT
INSTITUTION (LKD) PROGRAM IN RAWANG BINJAI VILLAGE,
PANGEAN DISTRICT,
KUANTAN SINGINGI REGENCY

By:
MUSPIDA
220411054

This research aims to analyze how the Village Community Institution (LKD) program is implemented in Rawang Binjai Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. LKD is a Village Community Institution that has a strategic role in planning, implementing, and supervising the program and increasing community participation. However, various phenomena in the field show that the implementation of the LKD program has not been government, minimal budget support. Weak coordination. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research informants consisted of the village head, village secretary, posyandu chair, PKK chair, leaders of farmer group and the community. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research indicate that the Village Community Institution (LKD) program in Rawang Binjai Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency has been implemented and is running.

Keywords: Implementation, LKD, Community Empowerment, Public Policy.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur negara Republik Indonesia yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional sampai ke tingkat basis masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai salah satu perangkat *stakeholder* lokal mempunyai peran strategis dalam mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi aspirasi sosial, serta upaya pemecahan masalah lokal melalui musyawarah dan partisipasi aktif. Sebagai mitra pemerintah desa, LKD diharapkan mampu menjembatani perencanaan program desa dengan kebutuhan nyata masyarakat. Namun, kondisi riil di tingkat desa sering menunjukkan bahwa fungsi LKD belum optimal dalam pelaksanaan perannya sebagai agen pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu. Manusia memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan bersamanya. Dalam perkembangannya muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan terbentuk lembaga-lembaga. Lembaga kemasyarakatan itu berperan penting dalam kehidupan suatu kelompok sosial.

Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang terpolakan serta

tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor.

Pemberdayaan merupakan proses, cara, perbuatan yang membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik material maupun spiritual guna mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa.

Program-program pengembangan masyarakat secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapisan bawah. Beberapa tahapan manajemen mulai dari perencanaan, pengkoordinasian, dan pengembangan berbagai langkah penanganan program atau proyek kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-

masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu inti dari pembangunan berbasis komunitas di tingkat desa. Konsep ini menekankan pada proses meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian warga desa dalam mengelola potensi serta memecahkan persoalan yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak dapat berjalan tanpa adanya kelembagaan lokal yang berfungsi sebagai penggerak proses tersebut.

DiIndonesia, salah satu lembaga yang memiliki mandat formal untuk menggerakkan pemberdayaan di desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Kedudukan LKD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. LKD bertugas membantu pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan serta peningkatan partisipasi masyarakat. Artinya, LKD bukan hanya pelaksana kegiatan, tetapi juga mitra strategis pemerintah desa dalam memastikan bahwa pembangunan benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat berbasis desa, persoalan implementasi juga sering terjadi pada lembaga pelaksana seperti LKD. Secara konseptual, LKD didesain sebagai organisasi lokal yang dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan riil di desa. Akan tetapi dalam praktiknya, dukungan pemerintah desa, koordinasi kelembagaan, sumber pembiayaan, serta partisipasi masyarakat seringkali tidak berjalan sebagaimana diidealkan dalam regulasi.

Akibatnya, program kemasyarakatan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial dan kesejahteraan warga.

Hal ini tentunya sebagai bentuk proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang lebih terlembaga. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai tugas Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat, Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tidak mungkin berjalan sendiri dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembangunan, tetapi diperlukan kerjasama dengan pemerintah desa. Terjadinya kerjasama yang baik diharapkan akan melahirkan program-program pembangunan yang baik dan sesuai pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat desa.

LKD di desa hanya aktif pada tataran administratif, tetapi tidak kuat pada pelaksanaan program. Lemahnya dukungan kebijakan, minimnya pendanaan, koordinasi yang terputus dengan pemerintah desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat sering menjadi hambatan berulang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat regulatif dan realitas operasional lembaga pemberdayaan di desa. Pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat Desa setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat secara mandiri/berkelanjutan.

Dalam implementasi program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memiliki peran penting untuk memberdayakan. Di kabupaten Kuantan Singingi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa-desa terutama di Desa Rawang Binjai Kecamatan pangean.

Kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan tersebut juga tercermin pada tingkat lokal, termasuk di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Secara struktural, desa telah memiliki LKD sebagai lembaga yang seharusnya menjadi motor dalam proses pemberdayaan masyarakat. Namun implementasi program pemberdayaan yang dijalankan LKD di desa tersebut belum menunjukkan capaian yang optimal.

Situasi ini menjadikan penting untuk dilakukan kajian ilmiah mengenai bagaimana implementasi program LKD di Desa Rawang Binjai berjalan, bagaimana dukungan pemerintah desa terhadap proses tersebut, apa saja hambatan yang muncul, dan sejauh mana program tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan masyarakat. Tanpa adanya kajian berbasis analisis, sulit untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat bagi optimalisasi peran LKD di masa depan.

Berdasarkan data dari Kantor Kepala Desa Rawang Binjai, Desa Rawang Binjai terdiri dari 3 dusun dan mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2025.

Tabel 1.1 Data Penduduk Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean kabupaten kuantan singing.

NO	DUSUN	RT	JUMLAH WARGA		JUMLAH KK
			LK	PR	
1	I	2	81	74	44
2	II	2	98	85	59
3	III	2	101	79	55
Total		6	280	238	158

Sumber: Kantor Kepala Desa Rawang Binjai 2025

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat di Desa Rawang Binjai sebagai salah satu Desa binaannya. Sebelum melaksanakan program-program tersebut, Lembaga Kemasyarakatan Desa telah menyusun berbagai rencana program.

Tabel 1.2 Jenis Program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis kegiatan	Satuan	Sasaran / manfaat	Sumber Dana Anggaran
1.	Posyandu (Pelayanan kesehatan)	Kelompok	Peningkatan kapasitas Masyarakat	APBDes
2.	PKK (Pemberdayaan dan pembinaan kesejahteraan keluarga)	Kelompok	Peningkatan kapasitas Masyarakat	APBDes
3.	Kelompok tani (Penyuluhan pertanian)	Kelompok	Peningkatan kapasitas Masyarakat	APBDes dan swadaya desa
Anggaran Dana Desa APBDes untuk Program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2025 RP. 11.263.250				

Sumber : Kantor Kepala Desa Rawang Binjai 2025

Dalam program-program tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implemetasi program tersebut. sejak Lembaga Kemasyarakatan Desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Rawang Binjai telah terjadi perkembangan di desa.

Namun dikarenakan program lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tidak berjalan dengan maksimal, maka program tersebut tidak terimplementasi, padahal program tersebut banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan / fenomena di lapangan:

1. Kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap pelaksanaan kegiatan program LKD masih rendah. Meski LKD secara hukum menjadi mitra pemerintah desa, namun dukungan pemerintah desa belum sepenuhnya diberikan dalam bentuk kebijakan, fasilitasi, maupun akses informasi perencanaan pembangunan desa.
2. Kurangnya kontribusi bantuan atau support anggaran dari pemerintah desa kepada LKD masih minim. Kondisi ini berdampak pada sulitnya LKD mewujudkan kegiatan program-program pemberdayaan yang telah direncanakan, karena sebagian besar kegiatan memerlukan dukungan sumber daya yang bersumber dari APBDes atau sumber lain yang terlegitimasi secara formal.
3. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan LKD dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum berjalan intensif. Koordinasi yang tidak terbangun dengan baik menimbulkan kesenjangan informasi, tumpang tindih program, bahkan memunculkan pandangan bahwa LKD hanyalah pelengkap administratif, bukan mitra strategis dalam pembangunan desa.
4. Pelaksanaan kegiatan program yang telah dilakukan belum memberikan dampak perubahan nyata bagi masyarakat, baik dari sisi peningkatan

partisipasi maupun peningkatan kesejahteraan. Kegiatan LKD cenderung bersifat *seremonial* dan tidak menyentuh aspek pemberdayaan yang bersifat *transformatif* sebagaimana didefinisikan para ahli pemberdayaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan di Desa Rawang Binjai Kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam Memberdayakan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa penggerak masyarakat Desa tersebut.

Maka penulis meneliti yang berjudul. **“Implementasi program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Di Desa Rawang Binjai Kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah: **“Bagaimana Implementasi program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Di Desa Rawang Binjai Kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana **Implementasi program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Di Desa Rawang Binjai Kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat penelitian teoritis

Memberikan masukan dan pertimbangan pemerintahan dalam pengembangan masyarakat yang melibatkan pemberdayaan masyarakat.

1.4.2 Manfaat penelitian Praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang sejahteraah dan bermanfaat bagi peneliti berikutnya untuk meneliti permasalahan yang sama di desa rawang binjai dengan masalah yang berbeda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian pustaka

2.1.1 konsep Administrasi Negara

Administrasi berasal dari bahasa Belanda, "*Administratie*" yang merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya).

Administrasi adalah kerjasama antarindividu atau dengan kelompok guna mencapai tujuan tertentu. Administrasi Negara mengatur dan melaksanakan berbagai tugas kenegaraan oleh aparatur negara atau pemerintah guna memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang memiliki efektivitas dan efisiensi yang baik.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Ridwan, 2011:29) mengartikan Administrasi Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafri, 2012:9) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

The Liang Gie (dalam Syafie, 2010:14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Soerjano Soekanto (dalam Syafie, 2010: 3), secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang

tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam Syafiie, 2010:13) Administrasi merupakan suatu fenomenal sosial, suatu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern Eksistensi dari pada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam organisasi.

Ciri-ciri administrasi disebutkan Thoha (2008:36) yaitu:

1. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dibindan andablej Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan denga administrasi negara, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara maupun orang lain.
2. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk menggunakan wewenng dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
3. Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya, priontas, diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
4. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut di udara.

5. Pimpinan atasnya (*Top Management*) bersifat politis Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik, hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

6. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagainya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah di ukur.

7. Banyaknya yang diharapkan dari administrasi negara.

Beberapa fungsi administrasi secara umum:

1. Perencanaan (*Planning*)

Proses menetapkan tujuan, kebijakan, dan strategi organisasi, serta menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pengorganisasian (*Organizing Penyusunan*)

Menata dan mengalokasikan sumber daya (manusia, finansial, material) serta membentuk struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat.

3. Pengarahan (*Directing*)

Memimpin, memotivasi, dan memberi bimbingan kepada anggota organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas mereka agar sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Pengendalian (*Controlling*) Memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan standar kinerja yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan.

5. Koordinasi (*Coordinating*)

Menyelaraskan berbagai kegiatan dan aktivitas agar berjalan lancar, tidak terjadi kekacauan, dan tercapai kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi

6. Pelaporan (*Reporting*)

Menyediakan informasi mengenai kegiatan, rencana, dan perkembangan yang telah dilaksanakan oleh organisasi kepada pihak terkait.

7. Penyusunan Anggaran (*Budgeting*) Mengelola dan menyusun biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan atau rencana organisasi.

8. Penempatan (*Staffing*):

Melibatkan aspek sumber daya manusia, seperti perekrutan tenaga kerja, pengembangan kemampuan, serta penyediaan perlengkapan yang dibutuhkan.

menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

Menurut Sondang P. Siagian, (2001:65) Administrasi sebagai ilmu bahkan kini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu ilmu sebagai ilmu pengetahuan mandiri Administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri memiliki objek formal, dalam arti sudut pandang adalah penyelenggaraan Baik penyelenggaraan yang bermula dari perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan evaluasi untuk memulai kembali pekerjaan terencana tersebut Dalam rangka penyelenggaraan

inilah diperlukan pengendalian kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sejak semula.

Harbani Pasolong mengartikan administrasi negara sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Administrasi negara adalah seluruh proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintah, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Administrasi negara mencakup segala aktivitas birokrasi pemerintahan, mulai dari perencanaan kebijakan, implementasi program, hingga evaluasi hasilnya.

Dalam pengertian luas ini, administrasi negara bukan hanya menyangkut kegiatan rutin birokrasi, tetapi juga bagaimana negara mengatur dan melayani kepentingan publik secara efisien dan efektif, dengan memperhatikan aspek hukum, politik, sosial, ekonomi,etika.

Administrasi Negara adalah cabang dari ilmu administrasi yang fokus pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kebijakan publik. Tujuan utamanya adalah untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan negara dan kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Konsep Manajemen

Management (di Indonesia di artikan sebagai manajemen) berasal dari kata manus (tangan) dan agree (melakukan) yang telah di gabung menjadi kata *manage*

(bahasa inggris) berarti mengurus atau *managiere* (bahasa latin) yang berarti melatih.

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis *Kunomenagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur.

Sedangkan secara terminologis parapakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:

1. Menurut Follet (dalam Wijayanti, 2008:1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
2. Menurut Stoner (dalam Wijayanti, 2008:1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
3. Menurut Gulick (dalam Wijayanti 2008:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.
4. Menurut Schein (2008:2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para professional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para professional

mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

5. Menurut Jhon D Millet (dalam Susatyo Herlamabang (2016:8) Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang yang terorganisir secara formal untuk mencapai tujuan.

Terry (2005:1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata.

Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Menurut Terry (2010) Manajemen terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut :

1. *Man*: Sumber daya manusia;
2. *Money*: Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
3. *Method*: Cara atau sistem untuk mencapai tujuan.

4. *Machine*: Mesin atau alat untuk memproduksi.
 5. *Materia*: Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan.
 6. *Market*: Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi;
- Information Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.

Menurut Terry (2010:9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan):

A. *Planning* (perencanaan)

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan.

Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Proses perencanaan berisi langkah-langkah: Menentukan tujuan perencanaan, menentukan tindakan untuk mencapai tujuan, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang, mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan dan mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

B. *Organizing* (pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan,

termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

mempunyai tujuan dan sasaran, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati, adanya kerjasama dari sekelompok orang, dan mempunyai koordinasi tugas wewenang. Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi.

C. Action (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

2.1.3 Konsep Organisasi

Menurut kamus besar Indonesia (KBBI) organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian – bagian (orang dan sebagainya) dalam kumpulan dan tujuan tertentu atau kelompok kerja sama antara orang – orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.

Teori organisasi adalah kumpulan prinsip dan konsep yang dirancang untuk memahami dan memprediksi perilaku, struktur, dan dinamika organisasi Melalui teori ini, manajer dapat menganalisis elemen-elemen penting seperti hierarki, komunikasi, dan pengambilan keputusan.

Teori organisasi adalah teori yang dipakai dalam mempelajari proses kerja sama antarindividu, hakikat kelompok di dalam organisasi dalam mencapai tujuan

hingga berbagai cara yang dipakai dengan menggunakan teori untuk bisa menjelaskan bentuk tingkah laku. Layaknya motivasi, seorang individu dalam melakukan proses kerja sama dalam sebuah organisasi.

Klasifikasi organisasi menurut para ahli :

1. Messie dalam Zulkifli

organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi bagi tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyetujukan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas- tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

2. Menurut Rosenweg (dalam sufian, 2005:31)

Organisasi dapat dipandang sebagai:

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok.
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerja sama.
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Unsur-unsur organisasi secara umum:

- a. Man, adalah unsur utama pembentuk organisasi yang disebut sebagai personil atau anggota yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri atas unsur pimpinan (administrator) sebagai pemimpin tertinggi organisasi para manajer pemimpin unit tertentu suatu kerja sesuai fungsinya dan para pekerja setiap hal tersebut merupakan kekuatan organisasi.

b. Kerja sama, adalah unsur organisasi dimana setiap anggota atau personil melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk tujuan bersama.

c. Tujuan bersama, adalah sasaran yang ingin dicapai atau diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

d. Peralatan (*equipment*), adalah sarana dan prasarana yang berupa kelengkapan dari organisasi tersebut baik itu berupa bangunan, materi, uang, dan kelengkapan lainnya.

e. Lingkungan (*Environment*), adalah unsur organisasi yang memiliki pengaruh. Faktor tersebut adalah ekonomi, sosial budaya, strategi kebijaksanaan, anggaran dan peraturan yang telah ditetapkan.

f. Kekayaan alam, yang termasuk dengan kekayaan alam adalah air, cuaca, keadaan iklim, flora dan fauna.

g. Kerangka/konstruksi mental organisasi, adalah landasan dari organisasi yang berada pada visi organisasi tersebut dibuat.

Menurut James D. Money (dalam Syafie 2010:51) Organisasi adalah sebagai bentuk seperti perserikatan orang – orang untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Usman Effendi (2014: 130) organisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah suatu sistem yang mengenai aktivitas – aktivitas yang berkoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerja sama ke arah suatu tujuan bersama. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari meskipun pada akhirnya hubungan – hubungan tak disadari untuk tujuan bersama.

2.1.4 Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut woll (2012:65) kebijakkan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Brian W. Hogmood dan Lewis A.Gunn (2011:65) secara umum kebijakkan di kelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Proses pembuatan kegiatan perumusan hingga di buatnya sesuatu kebijakan.
2. Proses imlementasi merupakan pelaksanaan kebijakkan yang sudah di rumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah di laksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang di gunakan dengan hasil yang di capai.

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Anderson (dalam Hill and Hupe 2002) memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

Friedrich (Widodo, 2007:13), mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Musopadidjaja (dalam Tahir, 2014:21), menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Anderson (dalam Tahir, 2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Selanjutnya Anderson (dalam Tahir, 2014:21), mengklasifikasikan kebijakan, policy, menjadi dua substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang

harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Menurut M.Irafan Islamy (2012:88) berpendapat bahwa "Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya sehingga policy lebih tepat diartikan sebagai kebiakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata wisdom".

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat sesuatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi.

Menurut Dunn (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Adapun menurut Woll (2012:27) terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Adanya pilian kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.

2. Adanya output kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan dipengaruhi kehidupan rakyat.

3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai itu sendiri.

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

James E. Anderson (dalam Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

2.1.5 Konsep Implementasi

Menurut hanifah harsono (2002:23) dalam bukunya yang berjudul implementasi kebijakan dan politik mengemukakan pendapat mengenai pengertian implementasi sebagai berikut : “ implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik dalam administrasi . pengembang kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program ”.

Pengertian implementasi yang di kemukakan di atas, dapat di katakana bahwa implentasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses, atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam birokrasi demi mencapai tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana biasa di percaya.

Menurut hanifah harsono (2006:67) mengemukakan pendapat mengenai pengertian implementasi sebagai berikut : “ implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Menurut Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Menurut Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Menurut George C. Edward III (dalam Dwiyanto Indiahono, 2009:31), implementasi kebijakan publik menunjuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut adalah:

1. Komunikasi: Menunjukkan bahwa kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan akurat kepada para pelaksana kebijakan (implementor)

maupun kelompok sasaran, sehingga tidak terjadi bias atau kesalahan interpretasi.

2. Sumber Daya: Sumber daya yang mendukung setiap kebijakan harus memadai, baik sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas implementor) maupun sumber daya finansial (anggaran).
3. Disposisi atau Sikap/Karakter Pelaksana: Merujuk pada sikap, komitmen, dan kejujuran para pelaksana kebijakan. Para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemauan yang tinggi dan antusiasme untuk melaksanakannya secara efektif.
4. Struktur Birokrasi: Menyangkut prosedur operasi standar (standard operating procedures/SOP) dan struktur organisasi yang jelas dan efektif untuk mengimplementasikan kebijakan, sehingga dapat mengurangi hambatan birokrasi.

2.1.6 Konsep Implementasi Kebijakan

Widodo (2005:5) implementasi yang di kemukakan di atas, dapat di katakana bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan di lakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karna itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi di pengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakkan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakkan di arahkn pada apa yang senyatanya oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin di lakukan oleh pemerintah.

Menurut Todaro (2013:45), pembangunan harus memenuhi 3(tiga) komponen dasar yaitu kecukupan memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri serta kebebasan untuk memilih. Menurut Todaro, pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapat, serta pengetasan kemiskinan.

Menurut Rostow (Dalam Johannes Muller 2010:91) Sebagai pakar pembangunan ekonomi menganggap bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah hakekat dari pembangunan itu sendiri. Kemudian Rostow mengemukakan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi yaitu Masyarakat tradisional, Masyarakat lepas landas, Gerakan kearah kedewasaan, Masa konsumsi tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, John Stuart Mill (Dalam Djanius Djamin, 2010:13) juga mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam hal pengembangan serta pembangunan ekonomi ialah adanya modal la menyatakan didalam teorinya yaitu teori pembangunan, Mill menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal Sementara tanah dan tenaga kerja adalah dua faktor produksi yang asli, sedangkan modal adalah persediaan yang dikumpulkan dari produk-produk tenaga kerja sebelumnya Mill menyetujui penetapan jam kerja atas bahwa undakan pemerintah suatu waktu diperlukan untuk mempengaruhi kepentingan pribadi para individu Dalam pembangunan ekonomi para ahli ekonomi klasik meyakini adanya perekonomian persaingan sempurna, pasar bebas dari segala campur tangan pemerintah.

Kaitan teori dengan judul penelitian yaitu, disini program Program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lebih teliti dalam menangani perekonomian masyarakat desa. Dengan di dirikan pembangunan dari program-program tersebut masyarakat dapat memanfaatkan dan menjadikan potensi dan kebutuhan bagi desa Penguatan lembaga yang sudah ada ini dilakukan melalui berbagai aktivitas pemberdayaan yang dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat.

Oos M. Anwas (2014:103) Dalam implementasi program ini, agen pemberdayaan atau lembaga pemberdayaan disamping memiliki program dari pemerintah, perlu mengalami secara benar akan potensi dan kebutuhan dari masyarakat Kegiatan seperti pemahaman lingkungan dan budaya, serta analisis kebutuhan dan potensi masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan lembaga pemberdaya. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi bahan penting untuk menyusun program pemberdayaan.

Oos M. Anwas (2014 :75) Keberhasilan utama dalam pemberdayaan adalah adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pembangunan Salah satu upaya dalam menciptakan partisipasi masyarakat yang tinggi diupayakan tumbuh kembangnya organisasi atau kelembagaan non formal masyarakat. Kelembagaan tersebut sebagai wahana komunikasi dan silaturahmi serta diskusi antar mereka. Kelembagaan tersebut juga sebagai wahana dalam melakukan kerjasama, sharing pengalaman, dan juga wahana pembelajaran.

Menurut Edward III (Mulyadi, 2015:47), “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

George C. Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling berkaitan. Keempat variabel ini harus diperhatikan secara simultan agar kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana. Implementasi akan berjalan efektif apabila semua pihak yang bertanggung jawab memahami apa yang harus mereka lakukan, tujuan kebijakan, serta informasi dikomunikasikan secara jelas, tepat, dan konsisten.

2. Sumber Daya

Variabel ini mencakup segala bentuk sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, seperti sumber daya manusia (jumlah dan kompetensi pelaksana), anggaran, informasi, fasilitas, serta wewenang yang cukup. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak dapat berjalan optimal.

3. Disposisi

Disposisi mencakup sikap, motivasi, dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang harus dijalankan. Sikap positif dan dukungan terhadap isi kebijakan akan mendorong pelaksanaan yang baik,

sedangkan resistensi atau ketidaksetujuan dapat menghambat proses implementasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada tata organisasi, prosedur kerja, koordinasi, dan hubungan antar unit organisasi yang melaksanakan kebijakan. Struktur yang tidak efisien, prosedur yang rumit, atau koordinasi yang buruk dapat menghambat pelaksanaan kebijakan meskipun sumber daya dan komunikasi sudah baik.

2.1.7 Pengertian Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

2.1.7.1 Pengertian (LKD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

2.1.7.2 Tugas dan fungsi LKD

LKD mempunyai beberapa tugas pokok, antara lain:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
4. Menggerakkan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan swadaya

Mendorong masyarakat ikut berkontribusi dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

5. Menumbuhkembangkan kondisi masyarakat yang dinamis dalam pemberdayaan

Adapun fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu :

1. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
3. Penyusun rencana, pengendalian, pelestarian, serta swadaya gotong – royong.
4. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta keserasian lingkungan hidup.
5. Pengendali, dan pembgembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

2.1.7.3 Tujuan Terbentuknya LKD :

Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, tujuan pengaturan pembentukan LKD mencakup antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan desa, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan berjalan partisipatif.
3. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

2.1.7.4 Visi dan Misi LKD :

Visi Lkd

“Terwujudnya masyarakat desa yang partisipatif, mandiri, sejahtera, dan berbudaya melalui peningkatan peran serta semua unsur kemasyarakatan.”

Misi Lkd :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Memfasilitasi komunikasi antara warga dengan pemerintah desa dalam penyaluran aspirasi.
3. Menggerakkan gotong royong dan kegiatan swadaya masyarakat untuk kepentingan bersama.
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya desa.
5. Mendukung program layanan publik agar lebih efektif dan responsif kepada warga.
6. Meningkatkan kapasitas anggota LKD melalui pelatihan dan koordinasi kelembagaan.

2.1.8 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut zubaidi (2013:72) istilah pembangunan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkebang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidak berdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunaan dan aspek lainnya. Konsep pemberdayaan

masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menepatkan manusia sebagai subjek dari dunia sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya power dan menekankan keberpihakan kepada kelompok aparatur pemerintah yang bertugas di lapangan.

Menurut Soetomo (2012:354) tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan mencipta individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku untuk menuju kearah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu petugas yang memperdayakan individu dan masyarakat baik formal maupun non formal dapat di sebabkan sebagai agen pemberdayaan (*agent of empowerment*).

2.1.9 Pengertian Pemerintahan Desa dan masyarakat

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan- batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni "*swadesi*" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa : "Yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 21 kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa (yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun atau sebutan lain) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Atau dengan kata lain, mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dandibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Koentjoroningrat (dalam Basrowi dan Soenyono, 2004) Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab "*syaraka*" yang berarti ikut serta, berpartisipasi atau "*musyaraka*" berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah "*society*" yang sebelumnya berasal dari kata Latin "*socius*" berarti kawan.

Masyarakat yang terdiri dari kumpulan manusia dapat melakukan interaksi sosial, sehingga partisipasi dalam kegiatan di masyarakat dapat berperan serta. Idealnya yang namanya bermasyarakat maka setiap individu dapat memiliki *sense*

of belonging di mana ia tinggal di lingkungannya. Dengan demikian rasa kebersamaan akan terpupuk karena berjalan secara berbarengan. Kecuali seseorang yang berada pada ruang pribadi yang tentunya sangat berbeda dengan ruang masyarakat.

Memaknai masyarakat tidak hanya sekadar masyarakat yang terdiri dari kumpulan manusia yang berada di perkotaan atau pedesaan. Akan tetapi lebih dari itu, bagaimana interaksi yang terjadi antara yang satu dengan yang lain memiliki kausalitas. Struktur dalam masyarakat pada jalinan hubungan sosial yang terdiri dari norma, kelompok, lembaga, dan stratifikasi sosial juga dapat ditelaah pada manusia dalam menjalankan aktivitas.

Hubungan yang terjalin antara yang satu dengan yang lainnya sangat mempengaruhi dalam pergaulan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain dalam melakukan aktivitas. Kadar hubungan sosial mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Hubungan sosial rendah yaitu terjalinnya komunikasi yang minim, hanya memerlukan kontak sosial ketika ada keperluan yang penting. Hubungan sosial sedang yaitu kedekatan antara personal berada di tengah-tengah, tidak terlalu intens dan jarak sosial tidak jauh dalam melakukan hubungan timbal balik.

Sementara hubungan sosial tinggi sudah mengarah pada keintiman dalam melakukan pertukaran sosial. Masyarakat yang terdiri dari beberapa individu memiliki tingkatan kehidupan yang dinamis. Mulai dari manusia yang menjalankan peranannya dalam kategori definisi sosial, fakta sosial, dan perilaku sosial. Paradigma sosial yang terdiri dari definisi sosial, fakta sosial, dan perilaku

sosial merupakan paradigma dalam melihat masyarakat manusia dari sudut pandang mikro, makro, dan tingkah laku.

2.1.10 Konsep Pembangunan Masyarakat

Konsep pembangunan masyarakat menurut Anwar (2007; 1) pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua teknik, yaitu:

- (1) partisipasi masyarakat, dan
- (2) pengorganisasian masyarakat.

Kedua teknik pembangunan ini merupakan proses pemberdayaan yang berarti pembangunan harus bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat. Konsep juga dapat dipahami sebagai program dan gerakan sosial. Sebagai program, pembangunan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan titik berat pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan pembangunan masyarakat sebagai gerakan social merupakan upaya untuk mewujudkan suatu ideologi.

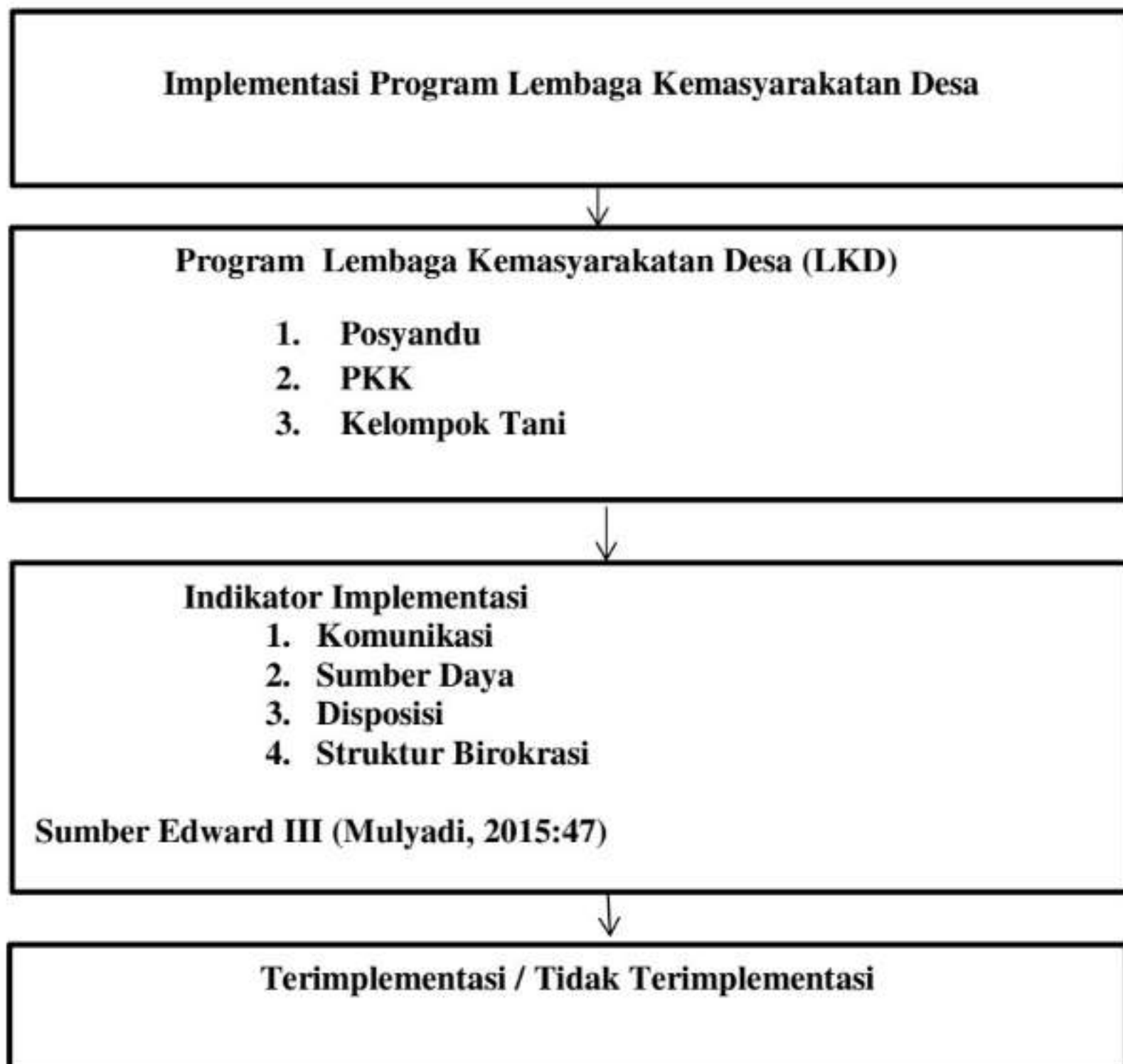
Menurut Carry (dalam Anwar, 2007;3) mengungkapkan, “pembangunan masyarakat merupakan perpaduan antara pengorganisasian masyarakat (*community organization*) dengan pengembangan ekonomi (*economic development*).” Pengorganisasian disini dapat dilakukan dengan menanamkan perasaan solidaritas diantara mereka dan menanamkan juga jiwa pembangunannya.

Sedangkan pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan peningkatan produksi melalui pembelajaran *life-skill* baru atau memadukan dengan potensi

yang dimilikinya, merangsang hasil pemasaran produksi, mendorong penciptaan modal dan mengembangkan sikap menghargai hasil kerja.

Menurut Muhadjir (dalam Anwar, 2007:3) mengungkapkan: Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyak penduduk bukan beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan.

2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025

2.3 Hipotesis Kerja

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya di tulis dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang di berikan baru berdasarkan teori yang relepan, belum di dasarkan pada fakta – fakta empiris melalui pengumpulan data.

Berdasarkan dari perumusan masalah penulis maka hipotesis yang di buat sebagai berikut di duga sementara bahwa implementasi program kemasyarakatan desa di desa rawang binjai kecamatan pangean kabupaten kuantan singing tidak terimplementasi dengan baik.

2.4 Defenisi Operasional

2.4.1 Program Kemasyarakatan Desa

1. Posyandu

Posyandu merupakan pilar utama penggerak pembangunan khususnya dibidang kesehatan. Mereka secara swadaya dilibatkan oleh puskesmas dalam kegiatan pelayanan kesehatan desa yang salah satunya adalah : pemberian imunisasi polio, penimbangan balita, pemberian vitamin dan makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan dan gizi.

Tanpa mereka kegiatan pelayanan kesehatan didesa tidak banyak artinya. Kader posyandu sebaiknya mampu menjadi pengelola posyandu dan memahami masyarakat. posyandu di desa di bagi menjadi 3 kelompok yaitu posyandu balita, posyandu lansia, dan posyandu remaja.

2. PKK

PKK singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan desa Program PKK antara lain : Pembinaan Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga Penyuluhan Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi.

3. Kelompok Tani

Kelompok Tani adalah lembaga kemasyarakatan desa yang beranggotakan petani dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, serta tujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam usaha pertanian melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pertanian secara bersama. Kelompok tani bertujuan meningkatkan hasil dan kesejahteraan melalui kegiatan antara lain : Menyusun rencana usaha tani, Mengelola bantuan sarana dan prasarana pertanian Mengikuti pelatihan dan penyuluhan pertanian

2.4.2 Variabel untuk pencapaian keberhasilan Implementasi :

Menurut Edward III (dalam Mulyadi, 2015:47) Mengemukakan model implementasi kebijakan publik menunjuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi, satu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group) Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya *distorsi* atas kebijakan dan program Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

b. Sumber Daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya

finansial Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas. maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi, atas sebuah program/kebijakan Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program kebijakan pemerintah Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumberdaya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan program Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan *demokratis Implementor* yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asas program yang telah digariskan dalam guideline program Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri

Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "*virus weberian*" yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.5. 1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item Penilaian
Implementasi Program Lembaga Kemasyarakatan (LKD)	1. Komunikasi	a) Apakah para implementor sudah menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat b) Sosialisasi program kepada masyarakat	Ordinal
	2. Sumber daya	a) Apakah pengurus Program Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugasnya b) Sarana dan prasarana kegiatan	Ordinal
	3. Disposisi	a) Bagaimana dukungan pemerintahan desa terhadap kinerja implementor b) Tanggung jawab implementor dalam menjalankan program	Ordinal
	4. Struktur birokrasi	a) Apakah struktur organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah jelas dalam pembagian tugas b) Koordinasi antar lembaga desa	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, (2017:7) Tipe penelitian yang dipakai dalam ini survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh. Subjek yang diteliti dalam hal ini adalah program pembangunan desa rawang binjai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Rawang Binjai dan Objek penelitiannya adalah Masyarakat Desa di Desa Rawang Binjai yang menjadi pemanfaat program pembangunan di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Moleon, (2006:90) Informan adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang latar penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Menurut Sugiyono, (2017:96) Teknik penentuan sampling yang peneliti gunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, atau penelitian tentang kondisi politik disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik . Sampel ini digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

Tabel: 3.2.1 Tabel Informan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Ketua Posyandu	1
4.	Ketua PKK	1
5.	Ketua Kelompok Tani	1
6.	Masyarakat	5
Jumlah		10

Sumber : Kantor Desa Rawang Binjai 2025

3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan sumber data yaitu :

3.3.1 Data Primer

Menurut M. Iqbal Hasan (2002: 82) Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang memerlukannya. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

data-data terkait tentang Bagaimana Implementasi program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Rawang Binjai yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:82) Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, yang dapat diperoleh dari perpustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, atau literatur lain yang berguna bagi penelitian ini. Data sekunder juga disebut data tersedia.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Adapun batasan peneliti yang menjadi fokus pada peneliti ini seperti yang dijelaskan dalam kerangka berpikir penelitian, yaitu dengan menjelaskan Bagaimana Implementasi program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan beberapa Indikator.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Adapun peneliti memilih lokasi di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi karena lokasi tersebut memiliki Implementasi program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang

bergerak aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan mengatasi perekonomian masyarakat serta meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Wawancara

Menurut Gunawan (2015:160) Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan formal.

3.6.2 Observasi

Menurut Gunawan, (2015:143) Observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Gunawan, (2015:177) Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2017:246) Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data yaitu *Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing/Verification*. Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut :

3.7.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono, (2016:247) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3.7.2 Penyajian Data

Menurut Sugiyono,(2016:249) Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

3.7.4 Trigulasi

Menurut sugiyono (2012:330) trigulasi di artikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan kata dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel : 3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	x																							
2	Pembuatan Proposal			x																					
3	Bimbingan Proposal							x	x	x	x														
4	Seminar Proposal																x								
5	Revisi Proposal																	x							
6	Pembuatan Skripsi																	x	x	x					
7	Bimbingan Skripsi																				x	x	x		
8	Sidang Skripsi																							x	
9	Revisi Skripsi																								x

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Rawang Binjai

Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten kuantan singing, kantor kecamatan ini terletak di dusun penghijauan paasar baru pangean, kawasan ini terletak dari 17 desa dan 55 dusun serta 87 RT. Salah satu hal yang tidak bisa di pisahkan dengan pangean adalah “ Silat Pangean” yang merupakan sebuah seni bela diri yang lahir dan di populerkan secara turun temurun oleh guru – guru besar silat pangean yang kenal dengan induak barompek secara umum silat pangean dapat di kelompok kan atas , silat tangan (silat tangan kosong), silat podang (silat menggunakan senjata podang) dan silat perisai (silat menggunakan senjata podang dan perisai).

Desa Rawang Binjai pertama sekali di temukan oleh datuk serang yang sedang berlayar mencari ikan menggunakan perahu, Desa Rawang Binjai terdiri dari banyak rawa- rawa dan sebuah pohon binjai yang masih ada sampai sekarang. Dahulunya akses ke desa menggunakan perahudan akses menuju kecamatan sangat sulit , Desa Rawang Binjai merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan pangean kabupaten kuantan singing provinsi riau.

Selanjutnya jarak kecamatan pangean ke provinsi 168 km dengan waktu 4 jam kendaraan bermotor , jarak tempuh ke kabupaten kota 32 km dengan waktu 45 menit perjalanan dari desa ke kecamatan 7 km dengan jangka waktu 15 menit. Kecamatan pangean memiliki luas wilayah sebesar 145,32 km yang terdiri dari 17 desa.

Tabel 4.1 : Tabel Jumlah Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

NO.	NAMA DESA / KELURAHAN
1.	Desa pasar baru
2.	Desa koto pangean
3.	Desa pulau kumpai
4.	Desa pauh angit
5.	Desa pauh angit hilir
6.	Desa pulau tengah
7.	Desa pulau rengas
8.	Desa padan kunik
9.	Desa rawang binjai
10.	Desa sako
11.	Desa sukaping
12.	Desa sungai langsung
13.	Desa padang tanggung
14.	Desa pematang
15.	Desa pulau deras
16.	Desa tanah bekali
17.	Desa teluh pauh

Sumber Kantor Camat Pangean 2025

4.2 Keadan Geografis

Desa Rawang Binjai mempunyai luas wilayah 9 km terdiri dari 3 Dusun dan 6 RT. Letak geografi Desa Rawang Binjai, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa sako kec. Pangean

Sebelah Selatan : Desa pulau ingu kec. Benai

Sebelah Barat	: Kelurahan beringin jaya kec. Sentajo raya
Sebelah Timur	: Desa pauh angit hulu kec. Pangean

4.2.1 Luas Wilayah Desa

Pemukimam	: 53 Ha
Pertanian Sawah	: 63 Ha
Lading / tegalan	: 0 Ha
Perkebunan	: 80 Ha
Hutan	: 0 Ha
Rawa – Rawa	: 0 Ha
Perkantoraan	: 0, 25 Ha
Sekolah	: 1,5 Ha
Jalan	: 15 Km
Lapangan Bola	: 1 Ha

4.2.2 Orbitas

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 7 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 15 Menit
Jarak ke ibu kota kabupaten	: 32 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	: 45 Menit

4.3 Keadaan Penduduk

4.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Rawang Binjai tahun 2025 adalah berjumlah 518 jiwa, dengn jumlah keluarga 158 kepala keluarga (KK). Penduduk Desa Rawang Binjai ini terdiri dari 280 laki –laki dan 238 perempuan.

Tabel 4.2 : Data Jumlah Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

NO	DUSUN	RT	JUMLAH WARGA		JUMLAH KK
			LK	PR	
1	I	2	81	74	44
2	II	2	98	85	59
3	III	2	101	79	55
Total		6	280	238	158

Sumber : Kantor Desa Rawang Binjai 2025

4.3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk desa rawang binjai berdasarkan KK pada umumnya memiliki mata pencaharian petani, pedagang, PNS, tukang , guru, swasta , peternak.

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Mata Pencaharian / Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	350
2.	Pedagang	6
3.	PNS	6
4.	Tukang	15
5.	Guru	10
6.	Swasta	12
7.	Peternak	62
8.	Pensiunan	1
Jumlah		462

Sumber : Kantor Desa Rawang Binjai 2025

4.3.3 Sarana Penduduk

Adapun Sarana Penduduk yang ada di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 : Sarana Penduduk Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak – kanak (TK)	1

2.	Sekolah Dasar (SD)	1
3.	MDA	1
Jumlah		3

Sumber : Kantor Desa Rawang Binjai 2025

4.4 Agama

Adapun Agama yang dianut di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 : Agama yang dianut di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	518
2.	Katolik	0
3.	Kristen	0
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
Jumlah		518

Sumber : Kantor Desa Rawang Binjai 2025

Tabel 4.6 : Sarana Tempat Ibadah Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholla	1
3.	Gereja	0
4.	Pura	0
Jumlah		2

Sumber : Kantor Desa Rawang Binjai 2025

4.5 Sarana Olahraga

Desa Rawang Binjai terdapat beberapa saran olahraga yang di peruntukkan bagi masyarakat yang ingin berolahraga untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel 4.7 berikut ini :

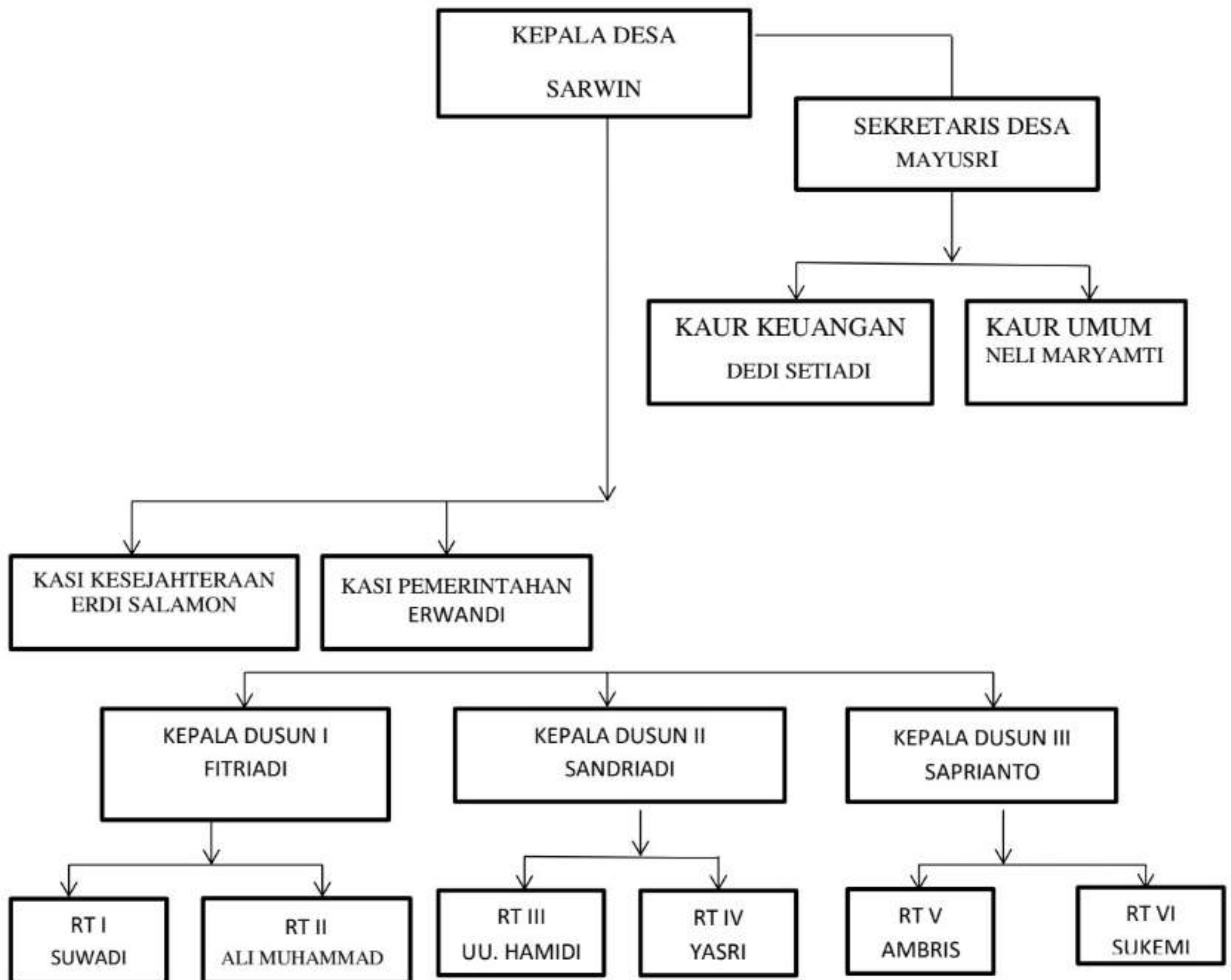
Tabel 4.7 : Sarana Olahraga di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Volly	1
2.	Lapangan Bola	1
Jumlah		2

Sumber : Kantor Desa Rawang Binjai 2025

4.6 Struktur Organisasi Desa Rawang Binjai

Gambar 4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean kabupaten kuantan singingi



Sumber : Kantor Desa Rawang Binjai 2025

Adapun tugas dan fungsi masing – masing pemerintahan desa Rawang Binjai adalah menurut Peraturan Daerah kabupaten kuantan singing Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (1) di jelaskan bahwa :

1. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.

Kemudian menurut pasal 11 Peraturan Daerah kabupaten kuantan singing Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (1) menjelaskan bahwa, kepala desa mempunyai fungsi :

- a. Mengerakkan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.
- b. Mengeerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat,
- d. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat

2. Sekretaris Desa

Sedangkan pada pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 menjelaskan Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretris desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat:
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- rundangan yang berlaku.

3. Kepala Urusan

Kemudian menurut pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 dijelaskan pula Kepala urusan bertugas membantu sekteraris desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekratais desa.

4. Kepala Dusun

Selanjutnya pada pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 menjelaskan tugas dari kepala dusun adalah:

- a. Melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di wilavah kerjanya,
- b. Melaksanakan keputusan atau kebijaksanaan kepala desa.

- c. Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong royongan;
- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

4.7 Visi dan Misi Desa Rawang Binjai

4.7.1 Visi Desa Rawang Binjai terwujudnya Desa Rawang Binjai sebagai desa yang mandiri berbasis Pertanian Perkebunan dan Perikanan untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera.

4.7.2 Misi Desa Rawang Binjai untuk mencapai tujuan visi diatas maka Desa Rawang Binjai menyusun misi sebagai agar visi dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi dari Desa Rawang Binjai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan
5. Meningkatkan pembangunan di bidang perikanan
6. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Implementasi Program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan analisis data, maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwa Program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah terimplementasi. Berdasarkan metode pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan. Hal ini di buktikan masih adanya program Lembaga Kemasyarakatan Desa yang masih berjalan sampai saat ini.

6.2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap Implementasi Program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) :

1. Bagi Pemerintah Desa Rawang Binjai, Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap implementasi Program Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui koordinasi yang lebih rutin, pembinaan kepada pengurus, serta pengelolaan dana desa yang lebih terarah agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
2. Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Rawang Binjai diharapkan dapat meningkatkan keaktifan, tanggung jawab, dan pemahaman

terhadap pembagian tugas dalam melaksanakan program. Dengan demikian, implementasi program dapat berjalan lebih teratur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Bagi Masyarakat Desa Rawang Binjai, Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam setiap kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga implementasi program dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dan merata bagi seluruh warga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afriansyah,dkk 2022, *Pemberdayaan Masyarakat*,PT Global eksekutif teknologi.
- Agustino, Lemhanas 2006, *Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anderson, 2000 E. James . *Public Policymaking: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin.
- Anwar Oos M. 2014, *Pemberdayaan Masyarakat dierah Global*, (Bandung, Alfa beta).
- Edward, C. George III 1980,*Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Gunawan, Imam. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksar.
- H, Nawawi. 1993,. *Administrasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J. L, Moelong, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, M. Iqbal. 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan 1.
- Harsono Hanifa, : 2002 *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: 2002.
- Hikmat Hani, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung Humaniora Utama Press), cetakan ke-2.
- Hikmat, R. Harry. 2010, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi* Bandung: Humaniora Utama Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta Gaya Media.
- Moleong, J. Lexy . 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M., Basrowi, & Soenyono. 2004. *Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma*. Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Muller Johannes, 2008, *Perkembangan Masyarakat*. Lantas PT Gramedia Pustaka Umum.
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasalong, Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik*, Bandung Alfabeta.
- P. S. Siagian,2020. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- S. Anwar, 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo, 2012, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafire, Inu Kencana, 2016. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Syafiie, Kencana 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi CV. Mandar. Maju: Bandung.
- Syahida. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, & Isril. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Universitas Riau Press.
- Ulber Silalahi. 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Usman Nurdin. 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, 2001. *Implementasi Kebijakan*, Bandung CV Pustaka Pelajar.
- Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana Praktik* ,Jakarta Pernada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Implementasi Program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama : Muspida
NPM : 220411054
Institusi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Tingkat Pendidikan :
Usia

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Identitas responden dijamin kerahasiaannya.
3. Hasil wawancara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis.
4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terima kasih.

D. Indikator

I. Komunikasi

1. Apakah para implementor sudah menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawaban :

2. Apakah sosialisasi Program Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah berjalan dengan jelas dan mudah di pahami oleh masyarakat Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawaban :

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Identitas responden dijamin kerahasiaannya.
3. Hasil wawancara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis.
4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terima kasih.

D. Indikator

I. Komunikasi

1. Apakah para implementor sudah menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawaban :

--

2. Apakah sosialisasi Program Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah berjalan dengan jelas dan mudah di pahami oleh masyarakat Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawaban :

--

II. Sumber Daya

1. Apakah pengurus Program Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugasnya Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawaban :

2. Bagaimana sarana dan prasarana kegiatan Program Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada masyarakat Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawaban :

III. Disposisi

1. Bagaimana dukungan pemerintahan desa terhadap kinerja implementor Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawaban :

2. Bagaimana tanggung jawab implementor dalam menjalankan Program Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawaban :

IV. Struktur Birokrasi

1. Apakah struktur organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah jelas dalam pembagian tugas Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawaban :

2. Bagaimana koordinasi antara pemerintahan desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

Jawaban :

**DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI DESA RAWANG
BINJAI, KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Gambar I : Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Rawang Binjai



Gambar II : Wawancara dengan Sekretaris Desa Rawang Binjai.



Gambar III : Wawancara dengan Ketua Posyandu Desa Rawang Binjai



Gambar IV : Wawancara dengan Ketua PKK Desa Rawang Binjai



Gambar V : Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani



Gambar VI : Wawancara dengan Masyarakat Desa Rawang Binjai



Gambar VII : Wawancara dengan Masyarakat Desa Rawang Binjai



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 008/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pembimbing I : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si

NIDN : 1021117906

Pembimbing II : Sarjan M, S.Sos., M.Si

NIDN : 1008128002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muspida

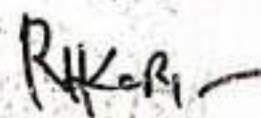
NPM : 220411054

Judul Skripsi : Implementasi Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025
Dekan,


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN PANGEAN
KANTOR KEPALA DESA RAWANG BINJAI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 32 /SKP/RB/IV/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MUSPIDA**
NIM : 220411054
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.
Jenjang Pendidikan : SI(Starata 1)
Alamat : Rawang Binjai
Judul Penelitian : "IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI DESA
RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI."

Dengan ini kami menjelaskan bahwa saudara/i **MUSPIDA** Selaku Mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), Benar telah melakukan penelitian Di Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean dengan Judul Penelitian "**IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**"

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan Di : Rawang Binjai

Pada Tanggal : 06 April 2026

Kepala Desa Rawang Binjai





YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Uniskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUSPIDA

NPM : 220411054

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si

2. SARJAN.M, S.Sos., M.Si

JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DIDESA RAWANG
BINJAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	6/2-2016	layatn tarlap			
	26/2-2016	Perbaikan BAB IV			
		BAB V hasil wawancara			
		Penyusunan hasil			
		Revisi			

		Revisi pulis daftar petak			
		Surat lamar berita melah w			
		Revisi petak laji			
		Daftar gambar kerangka, struktur desa			
		Aa. Atk diji			
7 APRIL	Observasi				
	AP & EX				
	kesimpulan				
14. APRIL	Lampiran				
	Observasi Setrap item				
	Biodata surat pernyataan SK Pembimbing Daftar wawancara				
20/4-2020	Aec. Uda				
	Di Revisi				



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Muspida

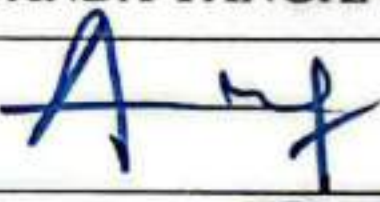
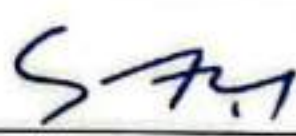
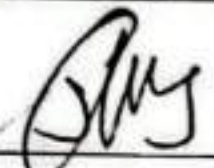
NPM : 220411054

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa
Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Rabu / 24 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2. 
3.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3. 
4.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4. 

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Muspida
NPM : 220411054
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Implementasi Program Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Rawang Binjai Kec. Pangean

Hari/Tgl Ujian : Kamis/ 21 Mei 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramdhanti, S.IP.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Anggota 2	4.
5.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muspida
Tempat/Tanggal Lahir : Rawang Binjai/07 November 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Rawang Binjai
Alamat Email : muspida127@gmail.com
Pendidikan : 1. Tahun 2010- 2016 LULUS SDN 006 Rawang Binjai
2. Tahun 2016- 2019 SMPN Satu Atap Pauh Angit
3. Tahun 2019- 2022 MAS BABUSSALAM Simandolak

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 19 April 2026
Penulis

MUSPIDA
NPM.220411054



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmpstsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmpstsp.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 40/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:011/FIS/UNIKS/I/2026 Tanggal 22 JANUARI 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	MUSPIDA
NIM	:	220411054
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	KANTOR DESA RAWANG BINJAI KEC.PANGEAN KAB.KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 29 Januari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.